

PUBLICIO JURNAL ILMIAH POLITIK, KEBIJAKAN DAN SOSIAL

E-ISSN : 2656-0305

DOI : <https://doi.org/10.51747/andemt96>

STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG. PUBLICIO

Liza Fitriani¹, Rita Junita², Fitri Herdayani³

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tamansiswa Palembang¹⁻³

korespondensi: ritajunita0@gmail.com

ABSTRAK

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang. Masalah difokuskan pada efektivitas kebijakan pengurangan, pengangkutan, pengolahan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah perkotaan. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori manajemen publik dan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan yang menekankan prinsip reduce, reuse, recycle. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa strategi pengelolaan sampah di Kota Palembang telah berjalan melalui optimalisasi layanan pengangkutan, pengembangan bank sampah, dan kemitraan masyarakat, namun masih menghadapi kendala pada aspek infrastruktur, kesadaran publik, dan keterbatasan teknologi pengolahan akhir. Penguatan tata kelola kolaboratif dan inovasi pengolahan berbasis lingkungan menjadi rekomendasi strategis untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: pengelolaan sampah; strategi publik; tata kelola lingkungan; partisipasi masyarakat; kota berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Permasalahan sampah merupakan salah satu persoalan perkotaan yang semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi, urbanisasi, serta perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk perkotaan secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi terhadap meningkatnya volume sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga, kawasan perdagangan, perkantoran, industri, fasilitas publik, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. Persoalan sampah tidak lagi dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kebersihan lingkungan, tetapi telah berkembang menjadi persoalan tata kelola pemerintahan, kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, efisiensi pelayanan publik, dan keberlanjutan pembangunan perkotaan. Apabila tidak dikelola secara sistematis, peningkatan timbunan sampah dapat menyebabkan pencemaran tanah, air, dan udara, menimbulkan gangguan kesehatan, memperburuk kualitas ruang kota, serta meningkatkan beban pembiayaan pemerintah daerah.

Dalam konteks pembangunan perkotaan berkelanjutan, pengelolaan sampah membutuhkan perubahan paradigma dari pendekatan yang berorientasi pada pengumpulan dan pembuangan menuju pendekatan yang menekankan pengurangan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada dasarnya menempatkan sampah sebagai bagian dari siklus sumber daya yang masih memiliki nilai ekonomi dan ekologis. Prinsip *reduce, reuse, dan recycle* (3R) menjadi salah satu pendekatan penting karena mendorong pengurangan timbulan sampah, penggunaan kembali material yang masih dapat dimanfaatkan, serta pemulihan nilai material melalui proses daur ulang. Dengan pendekatan tersebut, tempat pemrosesan akhir tidak lagi menjadi satu-satunya orientasi pengelolaan sampah, melainkan ditempatkan sebagai bagian terakhir dari suatu sistem pengelolaan yang dimulai dari sumber sampah.

Di Indonesia, pengelolaan sampah merupakan salah satu urusan publik yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah daerah memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan persoalan pelayanan persampahan di tingkat lokal. Pengelolaan sampah perkotaan mencakup rangkaian kegiatan yang saling berkaitan, mulai dari pengurangan dan pemilahan sampah pada sumbernya, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan sampah tidak dapat hanya diukur dari kemampuan pemerintah mengangkut sampah dari permukiman menuju tempat pemrosesan akhir. Efektivitasnya juga perlu dilihat dari kemampuan pemerintah mengurangi timbulan sampah, meningkatkan pemanfaatan kembali material, mengembangkan sistem pengolahan, menyediakan infrastruktur yang memadai, serta membangun partisipasi masyarakat.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting bagi kota-kota besar yang mengalami pertumbuhan aktivitas ekonomi dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Kota Palembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan di Sumatera Selatan menghadapi tantangan pengelolaan sampah yang kompleks. Pertumbuhan kawasan permukiman, perdagangan, jasa, transportasi, serta aktivitas masyarakat menghasilkan timbulan sampah yang harus ditangani melalui sistem pelayanan publik yang efektif. Dalam kondisi tersebut, Dinas Kebersihan Kota Palembang memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya pelayanan persampahan, baik melalui pengelolaan langsung maupun melalui kerja sama dengan berbagai pihak.

Strategi pengelolaan sampah di Kota Palembang pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kapasitas pemerintah dalam menyediakan sarana dan prasarana persampahan, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana organisasi publik merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pelayanan. Ketersediaan armada pengangkutan, tenaga operasional, tempat pengolahan, fasilitas persampahan, serta teknologi pengolahan merupakan komponen penting dalam sistem tersebut. Namun demikian, keberadaan infrastruktur belum secara otomatis menghasilkan pengelolaan sampah yang efektif. Efektivitas pelayanan juga sangat dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dalam membuang dan memilah sampah, kepatuhan terhadap ketentuan persampahan, keberadaan kelembagaan masyarakat, serta kemampuan pemerintah membangun mekanisme kolaborasi dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam perspektif manajemen publik, pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai bentuk penyelenggaraan pelayanan publik yang membutuhkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menghasilkan pelayanan yang efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan manajemen publik juga menempatkan sumber daya, kelembagaan, inovasi, dan akuntabilitas sebagai faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik. Dengan demikian, analisis terhadap strategi pengelolaan sampah perlu melihat bagaimana sumber daya peme-

rintah diterjemahkan menjadi kebijakan dan program yang menghasilkan perubahan nyata dalam sistem persampahan.

Permasalahan pengelolaan sampah juga menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Karakteristik sampah yang berasal dari berbagai sumber menyebabkan pengelolaannya membutuhkan keterlibatan masyarakat sejak tahap awal. Masyarakat merupakan produsen sampah sekaligus aktor penting dalam proses pengurangannya. Pemilahan sampah dari sumber, pengurangan penggunaan material sekali pakai, pemanfaatan kembali barang, serta penyerahan sampah yang memiliki nilai ekonomi kepada bank sampah merupakan bentuk partisipasi yang dapat mengurangi tekanan terhadap sistem pengangkutan dan pemrosesan akhir. Oleh sebab itu, kebijakan persampahan yang hanya berorientasi pada peningkatan kapasitas pemerintah tanpa diikuti perubahan perilaku masyarakat berpotensi menghasilkan sistem yang tidak efisien dalam jangka panjang.

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah pengembangan bank sampah. Bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah yang memiliki nilai ekonomi, tetapi juga dapat menjadi instrumen edukasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat didorong untuk melakukan pemilahan sampah dari sumber sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari material yang dapat didaur ulang. Keberadaan bank sampah dengan demikian memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi ekologis melalui pengurangan sampah dan dimensi sosial-ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, efektivitas bank sampah sangat bergantung pada keberlanjutan kelembagaan, dukungan pemerintah, akses terhadap pasar material daur ulang, konsistensi partisipasi masyarakat, serta integrasinya dengan sistem persampahan pemerintah daerah.

Selain aspek pengurangan dan partisipasi masyarakat, pengangkutan merupakan komponen penting dalam pengelolaan sampah perkotaan. Sistem pengangkutan yang tidak efektif dapat menyebabkan penumpukan sampah di tempat penampungan sementara, lingkungan permukiman, maupun ruang publik. Di sisi lain, peningkatan frekuensi pengangkutan tanpa diikuti pengurangan sampah dari sumber dapat meningkatkan biaya operasional pemerintah dan memperbesar beban pemrosesan akhir. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan antara strategi pelayanan pengangkutan dengan strategi pengurangan dan pengolahan sampah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan sistem yang tidak hanya mampu memindahkan sampah, tetapi juga mengurangi jumlah sampah yang pada akhirnya harus dibuang.

Tahap pengolahan akhir juga menjadi salah satu tantangan utama dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Keterbatasan teknologi, kapasitas fasilitas pengolahan, serta karakteristik sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam mengurangi residu. Sampah yang tidak dipilah sejak sumbernya cenderung tercampur dan menjadi lebih sulit untuk diolah kembali. Oleh karena itu, keberhasilan pengelolaan pada tahap akhir sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan pada tahap sebelumnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah merupakan suatu sistem yang saling berhubungan, bukan kumpulan kegiatan yang berdiri sendiri.

Dalam perkembangannya, pendekatan pengelolaan sampah juga semakin bergeser menuju tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif menekankan bahwa penyelesaian persoalan publik membutuhkan interaksi antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dunia usaha, dan aktor lainnya. Dalam konteks persampahan, pemerintah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, koordinator, sekaligus penyedia pelayanan publik, sedangkan masyarakat dan sektor nonpemerintah dapat berperan dalam pengurangan, pemilahan, pemanfaatan, dan pengolahan sampah. Pola hubungan semacam ini memungkinkan tercipt-

tanya pembagian peran yang lebih efektif sekaligus meningkatkan rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan lingkungan.

Meskipun demikian, penerapan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan masih menghadapi berbagai persoalan. Keterbatasan infrastruktur dapat menghambat perluasan pelayanan; keterbatasan teknologi dapat menyebabkan sebagian besar sampah masih berakhir pada pemrosesan akhir; sementara tingkat kesadaran masyarakat yang belum merata dapat menghambat penerapan pemilahan dan pengurangan sampah dari sumber. Selain itu, koordinasi antaraktor dan kesinambungan program juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Program persampahan yang hanya berjalan sebagai kegiatan sektoral berpotensi menghasilkan dampak yang terbatas apabila tidak diintegrasikan dengan kebijakan pembangunan kota secara keseluruhan.

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji pengelolaan sampah bukan hanya dari perspektif teknis, tetapi juga dari perspektif manajemen publik dan tata kelola pemerintahan. Penelitian mengenai strategi pengelolaan sampah perlu melihat hubungan antara kebijakan, kapasitas organisasi, kualitas pelayanan, infrastruktur, teknologi, serta partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, dapat diketahui apakah strategi yang diterapkan telah mampu menjawab persoalan persampahan secara menyeluruh atau masih berorientasi pada penanganan sampah setelah sampah dihasilkan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini memfokuskan perhatian pada strategi pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang. Fokus analisis diarahkan pada empat aspek utama, yaitu efektivitas kebijakan pengurangan sampah, pelaksanaan pengangkutan, pengolahan sampah, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Keempat aspek tersebut dipandang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan sistem pengelolaan sampah perkotaan. Penelitian ini menggunakan perspektif manajemen publik dan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan sebagai kerangka untuk memahami strategi, implementasi, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian tidak hanya diarahkan untuk mengukur jumlah atau volume sampah, tetapi juga untuk memahami proses pelaksanaan strategi, pengalaman aktor yang terlibat, bentuk partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dengan demikian, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pengelolaan sampah di tingkat pemerintah daerah.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai manajemen publik, khususnya dalam konteks penyelenggaraan pelayanan persampahan dan tata kelola lingkungan perkotaan. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas strategi pengurangan, pengangkutan, dan pengolahan sampah sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat. Penguatan tata kelola kolaboratif, pengembangan bank sampah, peningkatan kapasitas infrastruktur, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi pengolahan lingkungan menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam membangun sistem persampahan yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai ****bagaimana strategi pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang dan sejauh mana strategi tersebut efektif dalam mendukung pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan****.

Pertanyaan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam kajian mengenai bagaimana kebijakan pengurangan sampah dilaksanakan, bagaimana efektivitas sistem pengangkutan dan pengolahan, bagaimana partisipasi masyarakat dibangun, serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan strategi tersebut. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan strategi penguatan pengelolaan sampah berbasis tata kelola kolaboratif dan inovasi lingkungan di Kota Palembang.

2. METODE

2.1. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian diarahkan untuk memahami secara mendalam strategi pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang, termasuk proses implementasi kebijakan, praktik pelayanan persampahan, partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian tujuan pengelolaan sampah berkelanjutan.

Menurut [Creswell and Poth \(2018\)](#), penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu persoalan sosial. Pendekatan tersebut relevan dengan penelitian ini karena strategi pengelolaan sampah tidak hanya berkaitan dengan indikator kuantitatif, tetapi juga dengan pengalaman pelaksana kebijakan, perilaku masyarakat, pola koordinasi antarpemangku kepentingan, dan dinamika implementasi di lapangan. Sebagaimana dijelaskan oleh [Miles et al. \(2014\)](#), analisis kualitatif memungkinkan peneliti memahami hubungan antara data, konteks, tindakan aktor, serta proses yang terjadi dalam suatu fenomena sosial.

Desain deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi aktual pengelolaan sampah di Kota Palembang sekaligus menganalisis keterkaitan antara strategi pemerintah, kapasitas pelayanan, pengolahan sampah, dan partisipasi masyarakat. Penelitian tidak diarahkan untuk menguji hubungan kausal secara statistik, tetapi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bagaimana strategi pengelolaan sampah direncanakan dan dilaksanakan serta sejauh mana strategi tersebut mendukung prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan.

2.2. Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan fokus utama pada pelaksanaan strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang. Pemilihan lokasi didasarkan pada karakteristik Kota Palembang sebagai wilayah perkotaan dengan aktivitas penduduk, perdagangan, jasa, dan permukiman yang menghasilkan persoalan persampahan yang kompleks.

Fokus penelitian ditentukan berdasarkan sintesis konsep manajemen publik, pengelolaan sampah berkelanjutan, prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R), serta *collaborative governance*. [Ansell and Gash \(2008\)](#) menjelaskan bahwa penyelesaian persoalan publik melalui tata kelola kolaboratif membutuhkan keterlibatan aktor publik dan nonpublik dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan bersama. Berdasarkan perspektif tersebut, fokus penelitian tidak hanya diarahkan pada organisasi pemerintah, tetapi juga pada hubungan pemerintah dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Fokus penelitian terdiri atas empat dimensi utama:

1. **Strategi pengurangan sampah**, meliputi kebijakan pengurangan timbulan sampah, penerapan prinsip 3R, pemilahan sampah dari sumber, penggunaan kembali material, serta kegiatan daur ulang.
““
2. **Strategi pengangkutan sampah**, meliputi mekanisme pengumpulan dan pengangkutan, ketersediaan sarana dan prasarana, armada, sumber daya manusia, cakupan pelayanan, serta efektivitas pelaksanaan pelayanan.
3. **Strategi pengolahan dan pemrosesan akhir**, meliputi kapasitas fasilitas pengolahan, pemanfaatan teknologi, pengelolaan sampah organik dan anorganik, pengurangan residu, serta kendala dalam pemrosesan akhir.
4. **Partisipasi dan kolaborasi masyarakat**, meliputi keterlibatan masyarakat dalam pemilahan dan pengurangan sampah, keberadaan bank sampah, kegiatan edukasi, kemitraan dengan komunitas dan sektor swasta, serta bentuk kolaborasi antara pemerintah dan aktor nonpemerintah. ““

Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengidentifikasi kondisi aktual, praktik pelaksanaan, permasalahan, serta strategi penguatan pengelolaan sampah di Kota Palembang.

2.3. Sumber Data

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara dan hasil observasi lapangan. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap berbagai dokumen yang relevan dengan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan sampah.

Data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman dan perspektif aktor yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Informasi tersebut meliputi pelaksanaan kebijakan, mekanisme pelayanan pengangkutan, pengolahan sampah, permasalahan infrastruktur, pemanfaatan teknologi, partisipasi masyarakat, serta bentuk kerja sama antarpemangku kepentingan.

Data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah daerah, dokumen perencanaan, laporan pelaksanaan program, data persampahan, dokumen organisasi, serta publikasi ilmiah yang relevan. Penggunaan berbagai sumber data dilakukan untuk meningkatkan kedalaman dan kredibilitas analisis.

2.4. Pemilihan Informan

Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini digunakan karena penelitian membutuhkan informan yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam pengelolaan sampah di Kota Palembang. Menurut [Creswell and Poth \(2018\)](#), pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan relevansi pengalaman dan pengetahuan informan terhadap fenomena yang diteliti.

Informan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, yaitu:

1. pejabat atau pengelola pada Dinas Kebersihan Kota Palembang yang memiliki kewenangan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan persampahan;
2. petugas atau tenaga operasional yang terlibat dalam kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah;
3. pengelola bank sampah dan kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan 3R;
4. masyarakat sebagai pengguna atau penerima layanan persampahan; dan
5. pemangku kepentingan lain yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan sampah, termasuk komunitas dan sektor swasta.

Jumlah informan tidak ditentukan secara kaku sejak awal, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan kecukupan informasi. Pengumpulan data dihentikan ketika wawancara telah menghasilkan informasi yang relatif berulang dan tidak lagi menghasilkan tema substantif baru. Strategi tersebut sejalan dengan karakter penelitian kualitatif yang menekankan kedalaman informasi dibandingkan jumlah responden.

2.5. Teknik Pengumpulan Data

2.5.1 Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mendalam mengenai strategi dan praktik pengelolaan sampah. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti menggunakan pedoman pertanyaan sekaligus memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman dan pandangannya secara lebih luas.

Pedoman wawancara disusun berdasarkan empat fokus penelitian. Pertanyaan diarahkan pada kebijakan pengurangan sampah, mekanisme pengangkutan, proses pengolahan, kondisi infrastruktur dan teknologi, partisipasi masyarakat, pengelolaan bank sampah, serta bentuk koordinasi dan kolaborasi antaraktor.

Pendekatan wawancara tersebut memungkinkan peneliti mengidentifikasi tidak hanya apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dan kendala yang muncul dalam proses implementasi. Data wawancara selanjutnya ditranskripsikan dan dikategorikan berdasarkan tema penelitian.

2.5.2 Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai kondisi pengelolaan sampah di lapangan. Observasi diarahkan pada aktivitas pengumpulan dan pengangkutan sampah, kondisi tempat penampungan, aktivitas pemilahan dan pengolahan, kegiatan bank sampah, serta kondisi lingkungan yang berkaitan dengan pelayanan persampahan.

Observasi digunakan sebagai instrumen untuk membandingkan informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan kondisi aktual di lapangan. Dengan demikian, observasi berfungsi untuk memperkuat interpretasi data sekaligus mengidentifikasi kemungkinan adanya perbedaan antara kebijakan atau prosedur formal dengan praktik implementasinya.

2.5.3 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Dokumen tersebut mencakup regulasi, kebijakan pemerintah daerah, laporan kinerja, dokumen perencanaan, data persampahan, laporan kegiatan bank sampah, serta dokumen lain yang relevan.

Studi dokumentasi penting karena dokumen kebijakan dapat memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, indikator, serta strategi yang secara formal ditetapkan oleh pemerintah. Data tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara dan observasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

2.6. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang berperan dalam menentukan fokus penelitian, mengumpulkan data, melakukan interpretasi, dan menarik kesimpulan. Instrumen pendukung yang digunakan meliputi pedoman wawancara, lembar observasi, perangkat dokumentasi, serta catatan lapangan.

Pedoman wawancara dikembangkan berdasarkan indikator yang diturunkan dari konsep manajemen publik, pengelolaan sampah berkelanjutan, 3R, dan *collaborative governance*. Konsep *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Ansell and Gash (2008) digunakan untuk melihat aspek dialog, keterlibatan aktor, kepemimpinan, kepercayaan, komitmen, dan mekanisme kerja sama.

2.7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung sejak proses pengumpulan data sampai dengan penarikan kesimpulan. Model analisis mengikuti kerangka Miles et al. (2014) yang mencakup tiga aktivitas utama, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan serta verifikasi kesimpulan.

Tahap pertama adalah **kondensasi data**. Pada tahap ini, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi, diringkas, diberi kode, dan dikelompokkan berdasarkan fokus penelitian. Data kemudian dikategorikan ke dalam tema pengurangan sampah, pengangkutan, pengolahan, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi.

Tahap kedua adalah **penyajian data**. Data yang telah dikategorikan disajikan dalam bentuk uraian naratif, matriks tematik, dan hubungan antartema. Penyajian tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola, persamaan, perbedaan, dan hubungan antarfenomena yang ditemukan di lapangan.

Tahap ketiga adalah **penarikan dan verifikasi kesimpulan**. Kesimpulan disusun berdasarkan pola yang muncul dari data dan kemudian diverifikasi secara terus-menerus selama proses penelitian. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber informasi serta memeriksa kembali konsistensi antara data empiris dan interpretasi peneliti.

Secara analitis, proses penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Data Empiris → Kondensasi Data → Kategorisasi → Penyajian Data → Interpretasi → Kesimpulan
(1)

Analisis kemudian diarahkan untuk membandingkan kondisi empiris dengan konsep pengelolaan sampah berkelanjutan. Prinsip 3R digunakan untuk menilai orientasi strategi pengurangan dan pengolahan, sedangkan perspektif manajemen publik digunakan untuk menganalisis kapasitas dan efektivitas organisasi pemerintah. Selanjutnya, perspektif *collaborative governance* digunakan untuk menganalisis hubungan dan keterlibatan pemerintah, masyarakat, komunitas, serta aktor nonpemerintah.

2.8. Keabsahan Data

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, seperti pejabat pemerintah, petugas operasional, pengelola bank sampah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Apabila informasi mengenai suatu fenomena diperoleh secara konsisten dari beberapa sumber dan teknik pengumpulan data, maka tingkat kepercayaan terhadap informasi tersebut menjadi lebih kuat.

Menurut [Creswell and Poth \(2018\)](#), validitas dalam penelitian kualitatif dapat diperkuat melalui strategi triangulasi, pemeriksaan data secara sistematis, dan penggunaan berbagai sumber informasi. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menjadikan satu sumber informasi sebagai dasar tunggal dalam menarik kesimpulan.

2.9. Kerangka Analisis Penelitian

Kerangka analisis penelitian dibangun berdasarkan asumsi bahwa keberlanjutan pengelolaan sampah perkotaan merupakan hasil interaksi antara kapasitas pemerintah, efektivitas pelayanan, teknologi pengolahan, dan partisipasi masyarakat. Strategi pemerintah dianalisis melalui perspektif manajemen publik, sedangkan keberlanjutan pengelolaan sampah dianalisis melalui prinsip 3R dan tata kelola kolaboratif.

Secara konseptual, hubungan antarvariabel analitis dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:

Strategi Pemerintah+Kapasitas Pelayanan+Teknologi+Partisipasi Masyarakat+Collaborative Governance -
(2)

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian menganalisis bagaimana Dinas Kebersihan Kota Palembang mengintegrasikan strategi pengurangan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dengan mekanisme partisipasi dan kolaborasi masyarakat. Analisis juga diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan dan implementasi serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung.

Hasil akhir analisis digunakan untuk merumuskan strategi penguatan pengelolaan sampah di Kota Palembang, terutama melalui peningkatan efektivitas pelayanan, penguatan pengurangan sampah berbasis 3R, pengembangan kapasitas pengolahan, penguatan bank sampah, serta pengembangan tata kelola kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dan sektor swasta.

3. TINJAUAN LITERATUR

3.1. Pengelolaan Sampah Perkotaan

Pengelolaan sampah merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki karakteristik kompleks karena melibatkan dimensi lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan, dan teknologi secara simultan. Peningkatan urbanisasi, pertumbuhan penduduk, serta perubahan pola konsumsi masyarakat menyebabkan volume sampah perkotaan terus meningkat. ? menunjukkan bahwa dunia menghasilkan sekitar 2,01 miliar ton sampah perkotaan setiap tahun dan jumlah tersebut diproyeksikan meningkat secara signifikan hingga tahun 2050. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar persoalan teknis mengenai bagaimana sampah dikumpulkan dan dibuang, tetapi merupakan persoalan tata kelola perkotaan yang membutuhkan kapasitas kelembagaan, pembiayaan, teknologi, serta keterlibatan masyarakat.

Dalam konteks perkotaan, pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai suatu sistem yang mencakup kegiatan pengurangan sampah, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pendekatan sistem tersebut mengandung implikasi bahwa kegagalan pada satu tahapan dapat memengaruhi efektivitas keseluruhan sistem. Misalnya, rendahnya pemilahan sampah dari sumber akan meningkatkan beban pengangkutan dan mengurangi peluang pengolahan material yang masih memiliki nilai ekonomi. Sebaliknya, peningkatan kapasitas pengangkutan tanpa kebijakan pengurangan sampah berpotensi hanya memindahkan masalah dari sumber sampah menuju tempat pemrosesan akhir.

? menekankan pentingnya pendekatan pengelolaan sampah yang terintegrasi karena pengelolaan sampah berkaitan dengan aspek teknis sekaligus kelembagaan dan pembiayaan. Dalam konteks negara berkembang, keterbatasan kapasitas pemerintah daerah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan sampah tidak seluruhnya dapat dikelola secara aman. Oleh karena itu, strategi pengelolaan sampah perkotaan perlu mempertimbangkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan pelayanan sekaligus kemampuan untuk membangun kerja sama dengan aktor nonpemerintah.

Dalam konteks Indonesia, pengelolaan sampah memperoleh dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi tersebut kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. (?) Kerangka regulasi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan konvensional yang berorientasi pada pengumpulan dan pembuangan menuju pengurangan dan penanganan sampah secara lebih sistematis. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki posisi strategis dalam menerjemahkan kebijakan nasional tersebut ke dalam pelayanan persampahan di tingkat lokal.

3.2. Pengelolaan Sampah Berkelanjutan dan Prinsip 3R

Konsep pengelolaan sampah berkelanjutan menempatkan pengurangan timbulan sampah sebagai prioritas sebelum kegiatan pengangkutan dan pemrosesan akhir. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R). Prinsip *reduce* menekankan upaya mengurangi timbulan sampah sejak dari sumbernya, *reuse* mendorong pemanfaatan kembali barang yang masih dapat digunakan, sedangkan *recycle* menekankan pemulihan material melalui proses daur ulang.

Pendekatan 3R memiliki arti penting karena memperluas orientasi pengelolaan sampah dari se-

kadar *waste disposal* menuju *resource recovery*. Sampah tidak lagi dipandang sebagai material yang seluruhnya harus dibuang, tetapi sebagian dapat dikembalikan ke dalam siklus ekonomi melalui penggunaan kembali, daur ulang, pengomposan, maupun berbagai bentuk pengolahan lainnya. Dengan demikian, penerapan prinsip 3R berpotensi mengurangi beban tempat pemrosesan akhir sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan sosial.

? menunjukkan bahwa strategi pengurangan sampah pada sumbernya merupakan bagian penting dari upaya mengatasi peningkatan timbulan sampah secara global. Pendekatan tersebut menjadi semakin relevan bagi pemerintah daerah karena kapasitas tempat pemrosesan akhir pada dasarnya terbatas. Apabila strategi pemerintah hanya berfokus pada peningkatan kapasitas pengangkutan, maka pertumbuhan timbulan sampah akan terus meningkatkan tekanan terhadap infrastruktur pengelolaan akhir.

Dalam konteks Indonesia, efektivitas pengelolaan berbasis 3R juga telah menjadi objek penelitian empiris. Wati et al. (2021) menemukan bahwa efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis tempat pengelolaan sampah terpadu 3R dipengaruhi oleh berbagai faktor implementasi kebijakan, termasuk sumber daya, pelaksanaan program, serta keterlibatan masyarakat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan konsep 3R tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas pengolahan, tetapi membutuhkan dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, dalam penelitian ini konsep 3R digunakan sebagai salah satu landasan untuk menganalisis strategi pengurangan dan pengolahan sampah di Kota Palembang. Penggunaan konsep ini memungkinkan penelitian untuk melihat apakah strategi pengelolaan telah bergerak dari pendekatan yang berorientasi pada pengangkutan menuju pendekatan yang lebih berorientasi pada pengurangan dan pemulihan sumber daya.

3.3. Manajemen Publik dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari pelayanan publik yang membutuhkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Perspektif manajemen publik menempatkan organisasi pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelayanan publik. Dalam konteks persampahan, kemampuan manajemen tersebut dapat tercermin melalui perencanaan sistem pelayanan, penyediaan infrastruktur, pengelolaan armada, pengalokasian anggaran, pengembangan sumber daya manusia, pengawasan, serta koordinasi dengan masyarakat dan sektor swasta.

Pendekatan manajemen publik juga menekankan bahwa keberhasilan organisasi publik tidak hanya diukur berdasarkan terlaksananya kegiatan administratif, tetapi berdasarkan kemampuan organisasi menghasilkan pelayanan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sampah perlu dilihat dari kemampuan pemerintah dalam mencapai tujuan pelayanan persampahan, termasuk menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan cakupan pelayanan, mengurangi timbulan sampah, meningkatkan pengolahan, serta mendorong perubahan perilaku masyarakat.

Perspektif tersebut menjadi penting karena permasalahan persampahan sering kali memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Pemerintah dapat memiliki regulasi dan program yang relatif lengkap, tetapi efektivitasnya dapat terhambat oleh keterbatasan sumber daya, koordinasi antarlembaga, infrastruktur, teknologi, maupun partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu, penelitian mengenai strategi pengelolaan sampah perlu menghubungkan aspek kebijakan dengan kapasitas organisasi pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Dalam konteks ini, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan pengangkutan sampah, tetapi juga sebagai regulator, fasilitator, koordinator, dan penggerak partisipasi masyarakat. Perubahan peran tersebut semakin penting ketika pengelolaan sampah diarahkan pada pendekatan berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan berbagai aktor.

3.4. Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah

Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah dapat dipahami sebagai tingkat kemampuan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, efektivitas tidak hanya dilihat dari terlaksananya kegiatan pengangkutan sampah, tetapi juga dari kemampuan strategi pemerintah dalam mengurangi timbunan sampah, meningkatkan pengolahan, memperluas partisipasi masyarakat, serta mengurangi ketergantungan terhadap pemrosesan akhir.

Wati et al. (2021) memperlihatkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah berbasis 3R menghadapi tantangan implementasi yang berkaitan dengan kapasitas kelembagaan dan kondisi masyarakat. Temuan tersebut memperkuat argumentasi bahwa keberadaan kebijakan tidak secara otomatis menghasilkan perubahan dalam sistem persampahan. Efektivitas kebijakan sangat bergantung pada bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi program, bagaimana sumber daya dialokasikan, dan bagaimana aktor pelaksana serta masyarakat terlibat dalam proses implementasi.

Dalam konteks penelitian ini, efektivitas strategi pengelolaan sampah dianalisis melalui keterkaitan antara tujuan kebijakan dengan implementasi pada tingkat operasional. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengidentifikasi program yang telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang, tetapi juga melihat sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan perubahan dalam pengurangan, pengangkutan, pengolahan, dan partisipasi masyarakat.

3.5. Pengangkutan dan Pengolahan Sampah

Pengangkutan merupakan salah satu komponen fundamental dalam pelayanan persampahan perkotaan. Sistem pengangkutan yang efektif diperlukan untuk mencegah penumpukan sampah pada lingkungan permukiman dan ruang publik. Namun, pengangkutan seharusnya tidak diposisikan sebagai tujuan akhir pengelolaan sampah. Apabila sampah yang telah diangkut seluruhnya berakhir di tempat pemrosesan akhir, maka sistem tersebut masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap pendekatan *collect-transport-dispose*.

Pendekatan berkelanjutan menuntut adanya hubungan antara pengangkutan dengan pengurangan dan pengolahan. Sampah yang telah dipilah dan dikurangi sejak sumbernya akan menghasilkan volume residu yang lebih kecil untuk diangkut dan diproses pada tahap akhir. Dengan demikian, optimalisasi pengangkutan harus berjalan bersamaan dengan strategi pengurangan dan pengolahan.

Pengolahan sampah merupakan tahapan yang berfungsi mengubah sampah menjadi material atau produk yang memiliki nilai guna atau mengurangi karakteristik berbahaya dari sampah sebelum masuk ke pemrosesan akhir. Dalam konteks ini, keterbatasan teknologi menjadi salah satu faktor yang dapat membatasi efektivitas pengelolaan. ? menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah membutuhkan kombinasi antara pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang sesuai dengan karakteristik lokal serta kapasitas kelembagaan pemerintah.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pengelolaan sampah di Kota Palembang perlu melihat pe-

angkutan dan pengolahan sebagai dua komponen yang saling berhubungan. Peningkatan kualitas angkutan penting untuk menjamin pelayanan publik, tetapi dalam perspektif keberlanjutan harus diikuti dengan peningkatan kapasitas pengolahan sehingga jumlah sampah yang berakhir pada tempat pemrosesan akhir dapat dikurangi.

3.6. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar sampah berasal dari aktivitas masyarakat sehingga proses pengelolaannya secara logis harus dimulai dari sumber. Masyarakat memiliki peran dalam mengurangi penggunaan material yang menghasilkan sampah, menggunakan kembali barang, memilah sampah, menyerahkan material yang dapat didaur ulang, serta menjaga lingkungan.

? menempatkan partisipasi publik sebagai komponen penting dalam pengelolaan sampah perkotaan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat tidak hanya diperlukan pada tahap pelaksanaan program, tetapi juga dapat mencakup proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian, masyarakat seharusnya tidak hanya diposisikan sebagai penerima layanan pemerintah, tetapi juga sebagai aktor yang ikut membentuk keberhasilan sistem pengelolaan sampah.

Kajian mengenai Bank Sampah Sakura di Kelurahan Talang Kelapa, Palembang, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat muncul pada berbagai tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi (?). Temuan tersebut relevan dengan penelitian ini karena memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat telah memiliki ruang dalam konteks Kota Palembang.

Bank sampah pada dasarnya merupakan salah satu mekanisme yang menghubungkan dimensi lingkungan dengan dimensi ekonomi. Sampah yang memiliki nilai ekonomi dapat dipilah dan dikumpulkan oleh masyarakat untuk kemudian disalurkan melalui mekanisme bank sampah. Dengan demikian, insentif ekonomi dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong perilaku pemilahan dan pengurangan sampah.

Namun, partisipasi masyarakat tidak dapat hanya bergantung pada insentif ekonomi. Pengetahuan, kesadaran lingkungan, kepercayaan terhadap pemerintah, kemudahan akses layanan, serta komunikasi kebijakan juga dapat memengaruhi tingkat partisipasi. Penelitian terbaru mengenai program bank sampah di Kota Palembang juga menunjukkan pentingnya strategi komunikasi pemerintah dalam membangun partisipasi masyarakat (?). Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan sampah berbasis masyarakat membutuhkan kombinasi antara fasilitas, insentif, edukasi, komunikasi, dan kelembagaan.

3.7. Bank Sampah sebagai Instrumen Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat

Bank sampah merupakan salah satu inovasi kelembagaan dalam pengelolaan sampah yang mengintegrasikan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemanfaatan material, dan pemberdayaan masyarakat. Konsep tersebut memberikan peluang untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap sampah dari material yang tidak bernilai menjadi sumber daya yang memiliki nilai ekonomi.

Dalam perspektif pengelolaan berkelanjutan, bank sampah dapat berkontribusi terhadap prinsip 3R melalui pengurangan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir dan peningkatan pemanfaatan kembali material yang masih memiliki nilai. Namun demikian, efektivitas bank sampah sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan kelembagaan, kontinuitas partisipasi masyarakat, ketersediaan pasar material daur

ulang, dukungan pemerintah, serta integrasi dengan sistem persampahan formal.

Penelitian di Palembang mengenai Bank Sampah Sakura memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi dalam beberapa tahapan pengelolaan, termasuk perencanaan dan evaluasi (?). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa bank sampah dapat menjadi lebih dari sekadar fasilitas pengumpulan material, yaitu menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

Dengan demikian, keberadaan bank sampah dalam penelitian ini tidak hanya dianalisis berdasarkan jumlah atau keberadaan fasilitas, tetapi juga berdasarkan kontribusinya terhadap pengurangan sampah, perubahan perilaku masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan integrasinya dengan strategi pengelolaan sampah pemerintah daerah.

3.8. Collaborative Governance dalam Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan persoalan publik yang melibatkan banyak aktor sehingga pendekatan pemerintahan yang hanya mengandalkan kapasitas birokrasi menjadi kurang memadai. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan sumber daya tertentu, tetapi masyarakat merupakan sumber utama timbulan sampah, sektor swasta memiliki sumber daya ekonomi dan teknologi, sedangkan komunitas dan organisasi masyarakat dapat memainkan peran dalam edukasi serta pengelolaan berbasis lokal.

Konsep *collaborative governance* menawarkan pendekatan untuk memahami bagaimana berbagai aktor tersebut dapat terlibat dalam penyelesaian persoalan publik. Ansell and Gash (2008) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai pengaturan tata kelola yang mempertemukan aktor publik dan nonpublik dalam forum bersama untuk mengambil keputusan yang berorientasi pada konsensus. Berdasarkan kajian terhadap berbagai kasus, Ansell and Gash (2008) mengidentifikasi beberapa faktor penting dalam keberhasilan kolaborasi, antara lain kondisi awal, insentif untuk berpartisipasi, ketimpangan kekuasaan dan sumber daya, kepemimpinan, desain kelembagaan, dialog tatap muka, pembangunan kepercayaan, komitmen, serta pemahaman bersama.

Dalam konteks pengelolaan sampah, pendekatan kolaboratif menjadi relevan karena pemerintah tidak mungkin mengontrol seluruh proses pengelolaan sampah secara langsung. Pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat dalam pengurangan dan pemilahan, kerja sama dengan sektor swasta dalam pengolahan atau pemanfaatan material, serta keterlibatan komunitas dalam edukasi dan pengawasan.

Penelitian di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa kolaborasi dapat menjadi pendekatan penting dalam pengelolaan sampah. ? menemukan adanya proses kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah di TPST Tambakrejo, Sidoarjo. Studi di Yogyakarta juga menunjukkan bahwa keberhasilan kolaborasi dalam pengelolaan sampah dipengaruhi oleh kepemimpinan, insentif, interdependensi, dan ketidakpastian yang dihadapi para aktor (?).

Kajian yang lebih mutakhir memperlihatkan bahwa tantangan utama kolaborasi pengelolaan sampah di Indonesia mencakup ketimpangan sumber daya dan kekuasaan, fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal (?). Temuan serupa juga ditunjukkan dalam kajian evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Malang yang mengidentifikasi persoalan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang, fragmentasi kelembagaan, dominasi birokrasi, dan partisipasi masyarakat yang cenderung simbolik (?).

Berdasarkan kajian tersebut, kolaborasi dalam pengelolaan sampah tidak dapat dipahami sekadar sebagai keterlibatan banyak pihak. Kolaborasi yang efektif membutuhkan pembagian peran yang jelas,

komunikasi, kepercayaan, insentif, kepemimpinan fasilitatif, serta mekanisme koordinasi yang memungkinkan aktor memiliki tujuan bersama. Perspektif tersebut menjadi penting dalam menganalisis strategi pengelolaan sampah di Kota Palembang.

3.9. Sintesis Literatur dan Research Gap

Literatur mengenai pengelolaan sampah menunjukkan adanya beberapa kecenderungan utama. Pertama, pengelolaan sampah semakin dipahami sebagai sistem yang terintegrasi, bukan sekadar aktivitas pengumpulan dan pembuangan. Kedua, prinsip 3R menempatkan pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian penting dari pengelolaan berkelanjutan. Ketiga, keberhasilan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Keempat, keterbatasan kapasitas pemerintah mendorong kebutuhan terhadap tata kelola kolaboratif yang melibatkan masyarakat, sektor swasta, komunitas, dan aktor lainnya.

Meskipun demikian, terdapat ruang penelitian yang masih dapat dikembangkan. Sejumlah penelitian berfokus pada efektivitas program 3R, sementara penelitian lainnya menitikberatkan pada partisipasi masyarakat atau collaborative governance. Penelitian mengenai Palembang juga telah mengkaji partisipasi masyarakat dalam bank sampah serta strategi komunikasi pemerintah dalam membangun partisipasi. Namun, kajian yang mengintegrasikan aspek strategi pemerintah daerah, pengurangan, pengangkutan, pengolahan, bank sampah, dan partisipasi masyarakat dalam satu kerangka analisis masih relatif terbatas.

Research gap tersebut menjadi semakin penting karena efektivitas pengelolaan sampah tidak dapat ditentukan oleh satu komponen saja. Peningkatan pengangkutan, misalnya, dapat meningkatkan kebersihan kota dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menghasilkan keberlanjutan apabila pengurangan dan pengolahan tidak berkembang. Demikian pula, keberadaan bank sampah belum otomatis mengurangi beban sistem persampahan apabila tingkat partisipasi masyarakat rendah atau material yang terkumpul tidak memiliki mekanisme pengolahan dan pasar yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan strategi pengelolaan sampah sebagai fenomena multidimensional yang dianalisis melalui empat dimensi utama, yaitu: (1) strategi pengurangan sampah; (2) efektivitas pengangkutan; (3) kapasitas pengolahan dan pemrosesan akhir; dan (4) partisipasi serta kolaborasi masyarakat. Keempat dimensi tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan perspektif manajemen publik dan konsep collaborative governance.

Kerangka tersebut memungkinkan penelitian untuk tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apakah program pengelolaan sampah telah dilaksanakan, tetapi juga menganalisis bagaimana strategi tersebut diimplementasikan, faktor apa yang mendukung dan menghambatnya, serta bagaimana hubungan antara pemerintah dan masyarakat memengaruhi keberlanjutan program.

Dengan demikian, posisi penelitian ini berada pada irisan antara kajian manajemen publik, kebijakan lingkungan, pengelolaan sampah berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan collaborative governance. Kontribusi penelitian diharapkan terletak pada penyusunan pemahaman yang lebih integratif mengenai strategi pengelolaan sampah perkotaan dengan mengambil konteks Kota Palembang sebagai studi empiris.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

5. Hasil dan Pembahasan

5.1. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah di Kota Palembang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kota Palembang telah berkembang dari pendekatan yang semata-mata berorientasi pada pengumpulan dan pengangkutan menuju pendekatan yang mulai mengintegrasikan pengurangan sampah, pengolahan, bank sampah, dan partisipasi masyarakat. Perubahan orientasi tersebut terlihat dari semakin pentingnya program berbasis masyarakat dan penguatan fasilitas pengelolaan sampah pada tingkat sumber.

Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa jumlah sampah yang dikelola di Kota Palembang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Palembang, jumlah sampah yang dikelola tercatat sebesar 448.259 ton pada tahun 2022, meningkat menjadi 452.871 ton pada tahun 2023, dan mencapai 455.799 ton pada tahun 2024 (?). Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas pelayanan pengelolaan sampah terus berhadapan dengan volume sampah yang besar. Dengan demikian, peningkatan kinerja pengelolaan tidak cukup dilakukan hanya dengan meningkatkan kapasitas pengangkutan, tetapi harus disertai dengan pengurangan sampah dari sumber dan peningkatan kapasitas pengolahan.

Kondisi tersebut sejalan dengan temuan ? yang menunjukkan bahwa Kota Palembang menghadapi persoalan tingginya timbulan sampah dan keterbatasan fasilitas pengolahan serta infrastruktur. Penelitian tersebut mencatat timbulan sampah Kota Palembang pada tahun 2023 mencapai 439.815,66 ton. Perbedaan angka antara timbulan sampah dan sampah yang dikelola juga perlu diperhatikan secara metodologis karena keduanya merupakan indikator yang berbeda. Timbulan menggambarkan jumlah sampah yang dihasilkan, sedangkan sampah yang dikelola menggambarkan jumlah yang masuk dalam sistem pelayanan atau pengelolaan pemerintah.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama pengelolaan sampah Kota Palembang bukan hanya bagaimana mengangkut sampah yang telah dihasilkan, tetapi bagaimana mengendalikan pertumbuhan timbulan sampah dan meningkatkan proporsi sampah yang dapat dikurangi, digunakan kembali, didaur ulang, atau diolah sebelum masuk ke tahap pemrosesan akhir.

5.2. Strategi Pengurangan Sampah melalui Pendekatan 3R

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengurangan sampah telah mulai diarahkan pada penerapan prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R). Pendekatan tersebut terlihat melalui pengembangan bank sampah, kegiatan pemilahan sampah, penguatan TPS-3R, dan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumber.

Dalam perspektif pengelolaan sampah berkelanjutan, perubahan tersebut merupakan langkah strategis karena pengurangan dari sumber memiliki posisi lebih penting dibandingkan sekadar meningkatkan kapasitas pengangkutan. ? menempatkan pengurangan dan pemulihan material sebagai komponen penting dalam sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Semakin banyak material yang dapat dipisahkan dan dimanfaatkan kembali dari sumber, semakin kecil beban yang harus ditanggung oleh sistem pengangkutan dan tempat pemrosesan akhir.

Dokumen kinerja Pemerintah Kota Palembang juga menunjukkan bahwa TPS-3R diarahkan untuk mengurangi kuantitas dan memperbaiki karakteristik sampah sebelum masuk ke tempat pemrosesan akhir.

Pemerintah daerah juga menempatkan bank sampah sebagai instrumen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan mendaur ulang sampah (?).

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 3R masih menghadapi persoalan konsistensi. Program pengurangan sampah belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat secara merata. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan program dengan internalisasi perilaku pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga.

Temuan ini sejalan dengan ? yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat pada Bank Sampah Sakura di Palembang dapat berlangsung dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Dengan demikian, masyarakat sebenarnya memiliki kapasitas untuk menjadi aktor pengelolaan sampah, tetapi partisipasi tersebut membutuhkan kelembagaan dan mekanisme yang memungkinkan keterlibatan berlangsung secara berkelanjutan.

Dari perspektif manajemen publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengurangan sampah tidak dapat hanya dipahami sebagai penyediaan fasilitas 3R. Pemerintah perlu mengelola aspek perubahan perilaku, komunikasi kebijakan, insentif, pengawasan, dan keberlanjutan kelembagaan. Program 3R akan sulit menghasilkan dampak sistemik apabila masyarakat hanya dilibatkan pada tahap pelaksanaan tanpa dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi.

5.3. Optimalisasi Sistem Pengangkutan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkutan masih menjadi salah satu instrumen utama dalam strategi pengelolaan sampah Kota Palembang. Optimalisasi pelayanan pengangkutan diperlukan untuk memastikan sampah dari permukiman dan kawasan aktivitas masyarakat dapat dipindahkan secara teratur menuju fasilitas pengolahan atau pemrosesan akhir.

Dari perspektif pelayanan publik, pengangkutan merupakan komponen yang paling langsung dirasakan masyarakat. Ketepatan waktu, cakupan pelayanan, ketersediaan armada, kondisi sarana, serta kemampuan tenaga operasional menjadi faktor yang menentukan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan kebersihan.

Akan tetapi, penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengangkutan memiliki keterbatasan apabila tidak diikuti pengurangan sampah pada sumber. Peningkatan armada dan frekuensi pengangkutan memang dapat mengurangi penumpukan sampah dalam jangka pendek, tetapi tidak menyelesaikan persoalan pertumbuhan timbunan sampah. Dalam kondisi tersebut, pengangkutan hanya memindahkan beban sampah dari satu lokasi ke lokasi lain.

Secara konseptual, kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya perubahan dari model *collect-transport-dispose* menuju model pengelolaan yang lebih terintegrasi. ? menunjukkan bahwa sistem persampahan membutuhkan integrasi antara pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Dengan demikian, efektivitas pengangkutan seharusnya tidak hanya dinilai dari banyaknya sampah yang berhasil diangkut, tetapi juga dari seberapa jauh pengangkutan tersebut terintegrasi dengan sistem pengurangan dan pengolahan.

Dalam konteks Kota Palembang, temuan ini menjadi penting karena volume sampah yang dikelola terus berada pada tingkat yang tinggi. Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa sampah yang dikelola mencapai 455.799 ton pada tahun 2024 (?). Angka tersebut menunjukkan bahwa sistem pelayanan persampahan membutuhkan kapasitas operasional yang besar. Oleh karena itu, strategi pengurangan

di tingkat sumber perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk mengurangi tekanan terhadap sistem pengangkutan.

5.4. Pengolahan Sampah dan Keterbatasan Infrastruktur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan sampah merupakan salah satu aspek yang masih menghadapi keterbatasan. Permasalahan tersebut mencakup keterbatasan fasilitas, kapasitas teknologi pengolahan, dan belum optimalnya pengurangan residu sebelum sampah masuk ke tahap pemrosesan akhir.

Temuan tersebut konsisten dengan penelitian ? yang mengidentifikasi keterbatasan fasilitas pengolahan dan infrastruktur sebagai salah satu persoalan utama pengelolaan sampah di Kota Palembang. Penelitian mengenai TPA Sukawinatan juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di tingkat akhir menghadapi persoalan peningkatan volume sampah, keterbatasan infrastruktur, lemahnya penegakan regulasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat (?).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengolahan tidak dapat dipisahkan dari persoalan pada tahap sebelumnya. Sampah yang tidak dipilah sejak sumber akan memiliki kualitas material yang lebih rendah dan lebih sulit dimanfaatkan kembali. Sampah organik yang bercampur dengan plastik, kertas, dan material lain juga akan meningkatkan kompleksitas proses pengolahan.

Dengan demikian, penguatan teknologi pengolahan perlu disertai dengan penguatan sistem pemilahan dari sumber. Investasi teknologi tanpa perbaikan kualitas input berpotensi menghasilkan efisiensi yang rendah. Sebaliknya, peningkatan pemilahan tanpa tersedia pasar atau teknologi pengolahan juga dapat menyebabkan material yang telah dipisahkan kembali masuk ke sistem pembuangan.

Dalam perspektif manajemen publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa investasi infrastruktur harus dipandang sebagai bagian dari strategi sistemik, bukan sebagai intervensi tunggal. Pemerintah daerah perlu mengembangkan hubungan antara kebijakan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

5.5. Peran Bank Sampah dalam Pengurangan Sampah

Bank sampah merupakan salah satu strategi yang memiliki posisi penting dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat di Kota Palembang. Program tersebut memberikan mekanisme bagi masyarakat untuk memilah sampah yang memiliki nilai ekonomi dan menghubungkannya dengan sistem pemanfaatan kembali atau daur ulang.

Pemerintah Kota Palembang telah mendorong pembentukan bank sampah pada tingkat kecamatan. Pada Desember 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang melakukan koordinasi pembentukan bank sampah di 18 kecamatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan sampah. Program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari sampah yang dikelola.

Secara konseptual, strategi tersebut memiliki dua manfaat. Pertama, bank sampah dapat mengurangi sampah yang masuk ke sistem pembuangan. Kedua, bank sampah dapat menciptakan insentif ekonomi bagi masyarakat sehingga kegiatan pemilahan memiliki manfaat langsung.

Penelitian ? mengenai Bank Sampah Sakura di Kelurahan Talang Kelapa Palembang menunjukk-

an bahwa masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai tahap pengelolaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa bank sampah memiliki potensi menjadi institusi sosial yang mempertemukan kepentingan lingkungan dan kepentingan ekonomi masyarakat.

Namun, keberadaan bank sampah belum secara otomatis menjamin efektivitas pengelolaan. Penelitian terbaru mengenai kelembagaan bank sampah di Kota Palembang menemukan persoalan berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas yang tidak optimal, pencatatan yang masih manual, serta belum seragamnya SOP pada sejumlah bank sampah (?). Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa persoalan bank sampah bukan hanya masalah partisipasi masyarakat, tetapi juga masalah kapasitas kelembagaan.

Dengan demikian, strategi pemerintah perlu bergeser dari sekadar memperbanyak jumlah bank sampah menuju penguatan kualitas dan keberlanjutan kelembagaan bank sampah. Bank sampah yang tidak memiliki pengelolaan profesional, akses pasar, sistem administrasi, fasilitas, dan pendampingan berpotensi menjadi program yang bersifat administratif tanpa dampak signifikan terhadap sistem persampahan.

5.6. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan strategi pengurangan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya membangun partisipasi melalui bank sampah, sosialisasi, pembentukan komunitas, serta berbagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

Penelitian ? memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat Palembang dapat muncul pada empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya dapat berfungsi sebagai penerima pelayanan, tetapi dapat ditempatkan sebagai aktor dalam keseluruhan siklus kebijakan.

Namun demikian, partisipasi masyarakat masih menghadapi persoalan konsistensi. Kesadaran untuk memilah sampah sering kali tidak berlangsung secara seragam dan berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan mengenai lingkungan tidak selalu menghasilkan perubahan perilaku. Pemerintah perlu menyediakan mekanisme yang membuat perilaku pengelolaan sampah menjadi mudah dilakukan, memberikan manfaat, dan didukung oleh lingkungan sosial yang konsisten.

Temuan terbaru mengenai strategi komunikasi DLH Kota Palembang juga menunjukkan bahwa komunikasi lingkungan menjadi bagian penting dalam membangun partisipasi masyarakat melalui program bank sampah (?). Dengan demikian, komunikasi kebijakan tidak seharusnya hanya dilakukan dalam bentuk sosialisasi satu arah. Komunikasi perlu dirancang sebagai proses membangun pemahaman, kepercayaan, dan komitmen masyarakat.

Dalam perspektif manajemen publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi merupakan sumber daya kebijakan. Pemerintah yang mampu membangun partisipasi masyarakat dapat mengurangi sebagian beban operasional pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan efektivitas kebijakan. Sebaliknya, apabila masyarakat hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan, pemerintah akan menghadapi biaya pelayanan yang semakin besar seiring meningkatnya volume sampah.

5.7. Tata Kelola Kolaboratif dalam Pengelolaan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah Kota Palembang mulai bergerak menuju pola kolaboratif melalui hubungan antara pemerintah, masyarakat, bank sampah, komunitas, dan pihak ketiga. Pola tersebut menunjukkan adanya pengakuan bahwa pemerintah tidak memiliki seluruh sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan persampahan secara mandiri.

Menurut **Ansell and Gash (2008)**, collaborative governance menekankan keterlibatan aktor publik dan nonpublik dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan bersama. Dalam konteks pengelolaan sampah, prinsip tersebut relevan karena sumber masalah dan sumber daya penyelesaiannya tersebar pada berbagai aktor.

Penelitian ? mengenai Kota Palembang menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan kolaborasi dengan masyarakat dan pihak ketiga, termasuk Bank Sampah Sakura. Penelitian tersebut menemukan adanya pembagian peran antara pemerintah, masyarakat, dan pihak nonpemerintah serta adanya proses koordinasi dan sosialisasi. Temuan tersebut mendukung hasil penelitian ini bahwa kolaborasi telah menjadi bagian dari strategi pengelolaan sampah Kota Palembang.

Namun, collaborative governance tidak dapat dinilai hanya berdasarkan keberadaan kerja sama. **Ansell and Gash (2008)** menekankan pentingnya dialog, kepercayaan, komitmen, kepemimpinan, desain kelembagaan, dan pemahaman bersama dalam proses kolaboratif. Oleh karena itu, kerja sama pemerintah dengan bank sampah atau masyarakat belum dapat dikategorikan sebagai kolaborasi yang matang apabila hubungan tersebut hanya bersifat instruksional atau programatik.

Temuan terbaru mengenai Bank Sampah Kebumen Gemilang Sejahtera di Kota Palembang menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengelola bank sampah, masyarakat, dan sektor swasta dapat meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat. Namun, penelitian tersebut juga menemukan hambatan berupa keterbatasan fasilitas, ketidakkonsistenan masyarakat dalam memilah sampah, serta dukungan pemerintah yang belum optimal dan berkelanjutan (?).

Hal tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama collaborative governance di Kota Palembang bukan terletak pada absennya aktor, tetapi pada kualitas hubungan antarpihak. Pemerintah perlu bergerak dari pola hubungan yang bersifat administratif menuju hubungan yang memungkinkan aktor berbagi pengetahuan, sumber daya, risiko, dan tanggung jawab.

5.8. Kapasitas Kelembagaan sebagai Faktor Penentu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi pengelolaan sampah. Kapasitas tersebut meliputi sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, teknologi, prosedur kerja, kemampuan koordinasi, dan kapasitas inovasi.

Temuan mengenai kelembagaan bank sampah di Palembang memperlihatkan bahwa keterbatasan SDM, fasilitas, sistem administrasi, dan SOP dapat menghambat keberlanjutan program (?). Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan harus dilakukan secara simultan dengan penguatan partisipasi.

Dari perspektif manajemen publik, kelembagaan merupakan infrastruktur yang memungkinkan kebijakan diterjemahkan menjadi pelayanan. Kebijakan yang baik tanpa organisasi yang memiliki kapasitas implementasi akan menghasilkan kesenjangan antara tujuan dan hasil. Sebaliknya, organisasi

dengan kapasitas yang kuat tetapi tanpa kebijakan pengurangan dan partisipasi yang memadai juga akan menghadapi beban pelayanan yang terus meningkat.

Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan sampah di Kota Palembang perlu diarahkan pada tiga tingkatan. Pertama, tingkat internal pemerintah melalui peningkatan kompetensi SDM, sistem informasi, pengawasan, dan perencanaan. Kedua, tingkat fasilitas melalui peningkatan sarana pengolahan dan teknologi. Ketiga, tingkat jaringan melalui penguatan hubungan pemerintah dengan masyarakat, bank sampah, komunitas, dan sektor swasta.

5.9. Keterbatasan Teknologi dan Inovasi Pengolahan

Keterbatasan teknologi merupakan salah satu persoalan yang memengaruhi keberlanjutan sistem pengelolaan sampah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan pengolahan akhir masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi volume sampah yang harus dikelola. Kondisi tersebut membuat sistem tetap memiliki ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir.

Kajian mengenai TPA Sukawinatan menunjukkan bahwa keterbatasan teknologi pengolahan dan dominasi pendekatan pembuangan menjadi salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sampah Kota Palembang (?). Penelitian tersebut merekomendasikan penguatan teknologi yang lebih ramah lingkungan, termasuk pendekatan *sanitary landfill* dan teknologi pemulihan energi.

Namun demikian, inovasi teknologi tidak boleh diposisikan sebagai solusi tunggal. Teknologi pengolahan memiliki biaya investasi dan operasional yang tinggi serta membutuhkan input sampah dengan karakteristik tertentu. Karena itu, teknologi harus ditempatkan dalam sistem yang didukung oleh pemilahan, pengurangan, pengumpulan, dan pengangkutan yang baik.

Dengan kata lain, inovasi teknologi perlu mengikuti prinsip *fit-for-purpose*. Pemerintah daerah perlu memilih teknologi berdasarkan karakteristik sampah, kapasitas fiskal, kesiapan SDM, dampak lingkungan, dan keberlanjutan operasional. Pendekatan tersebut lebih rasional dibandingkan sekadar mengadopsi teknologi yang dianggap modern tanpa memperhatikan kesesuaian dengan kondisi lokal.

5.10. Integrasi Temuan dalam Perspektif Manajemen Publik

Jika seluruh temuan dianalisis secara integratif, terlihat bahwa persoalan pengelolaan sampah Kota Palembang bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal. Permasalahan merupakan kombinasi antara pertumbuhan volume sampah, keterbatasan infrastruktur, kapasitas pengolahan, perilaku masyarakat, serta kebutuhan koordinasi antaraktor.

Dari perspektif manajemen publik, kondisi tersebut menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah membutuhkan pendekatan *integrated public management*. Pemerintah harus menghubungkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi dalam satu sistem. Keberhasilan tidak cukup diukur dari jumlah sampah yang berhasil diangkut, tetapi harus dinilai dari kemampuan sistem mengurangi timbulan dan meningkatkan pemulihan material.

Secara konseptual, hubungan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Efektivitas\ Pengelolaan\ Sampah = f(Pengurangan, Pengangkutan, Pengolahan, Partisipasi, Kolaborasi) \quad (3)$$

Persamaan tersebut tidak dimaksudkan sebagai model statistik, tetapi sebagai kerangka interpretatif bahwa efektivitas pengelolaan sampah merupakan hasil interaksi berbagai komponen. Kelemahan pada satu komponen dapat mengurangi efektivitas komponen lainnya.

Sebagai contoh, peningkatan kapasitas pengangkutan tanpa pengurangan akan meningkatkan beban operasional. Sebaliknya, peningkatan bank sampah tanpa pasar material daur ulang dapat mengurangi insentif masyarakat. Demikian pula, investasi teknologi pengolahan tanpa pemilahan dari sumber dapat mengurangi efektivitas teknologi.

Temuan tersebut memperkuat argumentasi ? mengenai pentingnya sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi serta pandangan [Ansell and Gash \(2008\)](#) bahwa penyelesaian persoalan publik yang kompleks membutuhkan kolaborasi lintas aktor.

5.11. Sintesis Hasil Penelitian

Berdasarkan keseluruhan temuan, strategi pengelolaan sampah Kota Palembang dapat dipahami sebagai strategi yang sedang mengalami transisi dari pendekatan konvensional menuju pendekatan yang lebih berkelanjutan. Optimalisasi pengangkutan masih menjadi komponen penting, tetapi pemerintah mulai memperluas perhatian pada pengurangan sampah, bank sampah, TPS-3R, dan partisipasi masyarakat.

Kekuatan utama strategi tersebut terletak pada mulai terbentuknya ekosistem pengelolaan sampah yang melibatkan berbagai aktor. Pembentukan bank sampah pada tingkat kecamatan, penguatan komunitas, dan kerja sama dengan masyarakat menunjukkan adanya arah menuju pengelolaan berbasis partisipasi.

Namun, terdapat tiga persoalan strategis yang masih perlu diselesaikan. Pertama, kapasitas infrastruktur dan teknologi pengolahan belum sepenuhnya sebanding dengan volume sampah. Kedua, partisipasi masyarakat belum sepenuhnya konsisten dan masih membutuhkan edukasi serta insentif. Ketiga, kelembagaan bank sampah dan mekanisme kolaborasi belum seluruhnya memiliki kapasitas dan keberlanjutan yang memadai.

Dengan demikian, penguatan strategi pengelolaan sampah tidak seharusnya diarahkan hanya pada peningkatan jumlah fasilitas atau armada. Prioritas kebijakan perlu diarahkan pada integrasi antara pengurangan sampah, penguatan bank sampah, optimalisasi pengangkutan, pengembangan teknologi pengolahan, dan tata kelola kolaboratif.

5.12. Implikasi Strategis

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, terdapat beberapa implikasi strategis. Pertama, pemerintah daerah perlu menjadikan pengurangan sampah sebagai indikator strategis, bukan hanya jumlah sampah yang berhasil diangkut. Orientasi tersebut akan mendorong pergeseran dari *waste collection* menuju *waste reduction and resource recovery*.

Kedua, pengembangan bank sampah perlu dilakukan melalui pendekatan kelembagaan. Pemerin-

tah tidak cukup hanya membentuk unit bank sampah, tetapi perlu memastikan ketersediaan SDM, fasilitas, SOP, pencatatan, akses pasar, pendampingan, dan evaluasi. Temuan mengenai lemahnya kapasitas sebagian bank sampah di Palembang memperkuat kebutuhan tersebut (?).

Ketiga, partisipasi masyarakat perlu dibangun melalui komunikasi yang berkelanjutan. Sosialisasi satu arah perlu dikombinasikan dengan edukasi, insentif, mekanisme umpan balik, serta pemberian ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan evaluasi. Temuan ? memperlihatkan pentingnya strategi komunikasi dalam membangun partisipasi masyarakat pada program bank sampah.

Keempat, teknologi pengolahan perlu dikembangkan berdasarkan karakteristik lokal dan kemampuan pemerintah daerah. Investasi teknologi harus disertai dengan penguatan sistem pemilahan dan pengurangan dari sumber sehingga teknologi dapat bekerja secara efektif.

Kelima, pemerintah perlu memperkuat collaborative governance. Pemerintah memiliki posisi penting sebagai pengarah dan regulator, tetapi masyarakat, bank sampah, komunitas, dan sektor swasta harus diberikan ruang sebagai mitra strategis. Kolaborasi perlu diarahkan pada pembagian sumber daya, pengetahuan, tanggung jawab, dan manfaat, bukan hanya pembagian tugas administratif.

Dengan strategi tersebut, pengelolaan sampah Kota Palembang dapat bergerak dari model yang berorientasi pada pembuangan menuju model yang menempatkan sampah sebagai sumber daya yang dapat dikurangi, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah. Perubahan tersebut pada akhirnya dapat mengurangi tekanan terhadap sistem pengangkutan dan pemrosesan akhir sekaligus meningkatkan keberlanjutan lingkungan perkotaan.

6. KESIMPULAN

Strategi pengelolaan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota Palembang telah dilaksanakan melalui pengurangan di sumber, optimalisasi pengangkutan, pengelolaan TPA, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun menunjukkan kemajuan, tantangan pada aspek infrastruktur, teknologi, dan kesadaran publik masih menghambat efektivitas maksimal. Penguatan tata kelola kolaboratif dan inovasi teknologi menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan sampah perkotaan yang berkelanjutan.

7. KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian maupun publikasi artikel ini.

Pustaka

- Ansell, C. and Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4):543–571.
- Creswell, J. W. and Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 4 edition.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., and Salda na, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Source-book*. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 3 edition.

Wati, F. R., Rizqi, A., Iqbal, M., Langi, S. S., and Putri, D. N. (2021). Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah berbasis tempat pengelolaan sampah terpadu 3r di indonesia. *Perspektif*, 10(1):195–203.